

**PENGELOLAAN DANA PEMERINTAH DESA: KAJIAN PADA KECAMATAN
BABAKAN MADANG, SUKARAJA DAN CIAWI**

***THE MANAGEMENT OF VILLAGE GOVERNMENT FUND : STUDY IN THE BABAKAN
MADANG, SUKARAJA AND CIAWI***

M.N. Mukmin, S. Maemunah

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35, Kode Pos 16720, Telp/Fax : (0251) 8245155
Email : siti.maemunah@unida.ac.id

ABSTRACT

Basically the government is spending village funds to finance government programs in the welfare of the community. Village fund management the principle of transparency of accountability and participation. The method of this research design is using methods with descriptive associative. The population in this research were 28. With using purposive sampling technique. The data were analyzed by multiple linear regression. the result all data is valid and reliable, and the model in this research is worth. While the result of the analysis and hypothesis testing, showed that simultaneous test of partial test. Transparency, accountability and participation significant impact on the management of village government fund in the Babakan madang, Sukaraja and Ciawi. The contribution effect of transparency, accountability and participation on the management of village government fund in the Babakan madang, Sukaraja and Ciawi is 51,1 persen

Keyword: Transparency, Accountability, Participation, management of village government fund

ABSTRAK

Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan Dana Desa adalah untuk membiayai program-program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Sehingga pengelolaan dana desa dilakukan dengan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Desain penelitian ini menggunakan metode survey yang bersifat asosiatif. Populasi penelitian sebanyak 280 populasi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengujian dan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan semua instrumen dalam penelitian ini valid dan reliabel. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana pemerintah desa pada kecamatan babakan madang, kecamatan sukaraja dan kecamatan ciawi. Besarnya kontribusi pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan dana pemerintah desa yaitu sebesar 51,1 persen.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Pengelolaan Dana Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik bagitu cepat, terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu cara pemberdayaan daerah untuk pengambilan ketentuan daerah agar lebih bebas serta bertanggungjawab untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan, kemampuan daerah sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah wajib mengarah pada peningkatan kesejahteraan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan serta aspirasi masyarakat.

UU desa menciptakan energi baru dalam upaya membangun Indonesia menjadi lebih baik. walaupun desa adalah tingkat pemerintahan paling rendah di Indonesia, tetapi membangun Indonesia tanpa melibatkan desa di dalamnya merupakan hal sangat disayangkan. Desa merupakan identitas pemerintahan yang berkaitan langsung dengan rakyat, tetapi secara geografis berjarak jauh dari pusat kekuasaan di atasnya. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti penting sebagai basis pelaksana pelayanan publik dan menyediakan pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sebagai penyelenggara publik pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri yang bersumber dari dana desa.

Serasi dengan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai desa, Pemerintah mengalokasikan dana desa, dengan proses transfer pada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, tiap Kabupaten/Kota mendistribusikan kepada setiap desa berlandaskan jumlah desa serta memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan taraf kerumitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran seperti dijelaskan di atas, berasal dari Belanja Pusat dengan mengaktifkan program yang berbasis desa dengan menyeluruh dan berkeadilan. Besarnya distribusi anggaran yang diperuntukan ke desa ditentukan 10 persen

dari dana di luar dana transfer daerah secara bertahap. Permendagri No 113 Thn 2014 menyatakan bahwa keuangan desa di lakukan dengan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran

Berdasarkan pernyataan tersebut pemerintah desa dituntut agar meningkatkan transparan dan akuntabel dalam proses perencanaan sampai proses pertanggungjawaban selain itu masyarakat maupun lembaga lain dalam setiap kegiatan harus di ikut sertakan agar terhindari dari terjadinya kecurangan. Namun masih ada yang harus dibenahi dari ketiga asas tersebut, banyak masyarakat yang merasa bahwa pengelolaan kuangan desa kurang mengikut sertakan masyarakat, selain itu masyarakat masih belum merasakan pengaruh positif dari adanya dana desa tersebut, sehingga masyarakat berfikir bahwa aparat desa dalam pengelolaannya kurang transparansi, akuntabel serta partisipasif.

Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan anggaran adalah untuk membiayai program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga dengan adanya dana desa setiap program pemerintah dapat terlaksana dengan lebih mudah. Namun disisi positifnya Dana Desa justru membuka peluang untuk pihak yang memiliki kepentingan pribadi untuk berlaku curang, sehingga anggaran desa yang seharusnya dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan umum justru malah di pergunakan untuk kebutuhan sendiri sedangkan untuk kepentingan umum hanya sekadarnya saja, yang lebih memperhatinkannya lagi penyalah gunaan Dana Desa sering dilakukan oleh

pihak yang dinaggap amanah, atau oleh pihak pemimpin masyarakat, selain itu kurangnya tingkat pengetahuan tentang akuntansi oleh aparat desa dapat memberikan peluang besar untuk menjalankan manipulasi dana tersebut.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2010:3) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik ialah mekanisme teknis serta kajian akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM & yayasan sosial, maupun pada proyek kerjasama sektor publik & swasta.

Pengertian Akuntansi Desa

Sujarweni (2015 :1) Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, & melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan diperlukan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Pengertian transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) yaitu:

1. *Invormativeness* (informatif)
2. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengertian Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan & mengungkap segala kegiatan dan menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut (Marsiasmo, 2002:20).

Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang perlu dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

Pengertian Partisipasi

UNDP (United Nation Development Program) dalam Mardiasmo (2002:18) Partisipasi (*Participation*) ialah keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar

1. Kebebasan berasosiasi
2. Kebebasan berbicara
3. Berpartisipasi secara konstruktif.

Pengertian Dana Desa

Pasal 1 angka 2 PP No. 8 Tahun 2016 Dana Desa yakni dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kota/kabupaten & digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian berikut dijelaskan dana desa diperuntukkan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tetapi, dana desa diprioritaskan dalam pembiayaan pembangunan & pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Pemerintah Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk

beberapa tahapan. Pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Pemerintah Desa

Transparansi ialah aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. terwujudnya tata pemerintahan yang baik membuktikan adanya keterbukaan, keikutsertaan, dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan & kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁ : Diduga Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana pemerintah desa.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Pemerintah Desa

Akuntabilitas publik memiliki peran penting pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

Hipotesis yang kedua sebagai berikut:

H₂ : Diduga akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana pemerintah desa.

Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Pemerintah Desa

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diadakan pemerintah tergantung pada sejauhmana pemerintah mengajak masyarakat untuk langsung ikut serta disetiap kegiatan yang diadakannya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar terhindari dari terjadinya kesalahpahaman dalam setiap kegiatan selain itu partisipasi masyarakat merupakan salah satu asas dalam pengelolaan dana desa. Hipotesis yang ketiga sebagai berikut:

H₃ : Diduga partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berkenaan dengan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan dana pemerintah desa. Pada wilayah Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja dan Ciawi.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah asosiatif, yakni penelitian yang menguji hubungan atau hubungan antara variabel, dua variabel atau lebih.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Sarosa (2012), penelitian kuantitatif ialah penelitian yang menggunakan pengukuran kuantitatif untuk menguji hipotesis dengan tujuan menemukan generalisasi dan menekankan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat diantara variabel.

Variabel Penelitian Dan Definisi Oprasional variabel

Variabel Independen dalam penelitian ini ialah Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi. Sedangkan variabel dependennya ialah Pengelolaan Dana Pemerintah Desa. Berikut ini adalah tabel 1 oprasional variabel

Tabel 1 Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Sekala
Transparansi (X ₁)	Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. (Mardiasmo 2009:19)	1. Pemberikan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada <i>stakeholders</i> 2. Pengungkapan. kepada masyarakat atau publik (<i>stakeholders</i>)	Ordinal Ordinal
Akuntabilitas (X ₂)	Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2002:20).	1. Akuntabilitas Hukum dan akuntabilitas kejujuran 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
Partisipasi (X ₃)	Partisipasi ialah Keikutsertaan masyarakat untuk membuat keputusan baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. (Mardiasmo, 2002:18)	1. Kebebasan berasosiasi 2. Kebebasan berbicara 3. berpartisipasi secara konstruktif.	Ordinal Ordinal Ordinal
Pengelolaan Dana Pemerintah Desa (Y)	Pengelolaan Dana Pemerintah Desa merupakan pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan ialah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan. (Permendagri No. 113 Tahun 2014)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini merupakan perangkat desa sebanyak 280 yang terdapat pada wilayah Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja dan Ciawi.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:96) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga dari 280 populasi setelah *dipurposive* menghasilkan 140 sampel

Pengujian Data

Instrumen untuk mengukur ketiga variabel dalam penelitian menggunakan kuesioner. Responden akan menilai setiap pernyataan dengan menggunakan skal likert 5 poin, dari persepsi responden bahwa responden sangat tidak setuju sampai setuju terhadap suatu

pernyataan yang ada pada kuisisioner. Untuk tujuan analisis kuantitatif, lalu jawaban diberi skor.

Tabel 2 Penilaian Kuesioner

Jawaban Responden	Bobot Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber : Sugiyono, 2013

Untuk kriteria penilaian ialah sebagai berikut

Tabel 3 Skala Penilaian

Skala	Interpresentasi
1,00 – 1,80	Sangat tidak setuju
1,81 – 2,60	Tidak setuju
2,61 – 3,40	Ragu-ragu
3,41- 4,20	Setuju
4,21 – 5,00	Sangat setuju

Sumber : Sugiyono, 2014

Uji Validitas

Sebelum kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu diuji validitasnya kepada responden, dengan memakai rumus teknik korelasi “*product moment*” (Sugiyono, 2013:183), sebagai berikut:

$$r = \frac{N(\sum xy) - (\sum x \sum y)}{\sqrt{(N\sum x^2) - (N\sum x)^2} \sqrt{(N\sum y^2) - (N\sum y)^2}}$$

Dimana:

- r = Koefisien validitas item yang dicari
 x = Skor yang diperoleh dari subyek dalam tiap item
 y = Skor total yang diperoleh dari subyek seluruh item.
 $\sum x$ = Jumlah skor dalam distribusi x
 $\sum x^2$ = Jumlah kuadrat pada masing-masing x
 $\sum y^2$ = Jumlah kuadrat pada masing-masing y
 N = Jumlah responden.

Tabel 4 Kriteria Uji Validitas

Corrected Item Total Corelation	Keterangan
$\geq 0,3$	Valid
$< 0,3$	Tidak Valid

Sumber : Sugiyono, 2013

Uji reliabilitas

Untuk mengukur Relibilitas dalam penelitian ini memakai teknik *cronbach*. (Gozali, 2011:45). Rumus teknik *cronbach* sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[\frac{\sum \sigma_b^2}{1 - \sigma_t^2} \right]$$

Dimana:

- r_{11} = reliabilitas instrumen
 k = banyak butir pertanyaan
 σ_t^2 = Varian Total
 $\sum \sigma_b^2$ = Jumlah Varian Butir
 berikut ini ialah tabel untuk kriteria uji reliabilitas.

Tabel 5 Kriteria Uji Reliabilitas

Alpha Cronbach	Keterangan
$> 0,6$	Reliabel
$< 0,6$	Tidak Reliabel

Sumber : Sugiyono, 2013

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang mendasari dan menjadi persyaratan statistik yang perlu dipenuhi dalam penggunaan analisis regresi dan koefisien regresi yang linier, tidak bias, konsisten, serta efisien. Asumsi klasik menurut Ghazali (2011) adalah uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastitas.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Regresi linear berganda Sugiyono (2013:206) adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

- Y = kepatuhan wajib pajak
 a = nilai konstanta
 X1 = Transparansi
 X2 = Akuntabilitas
 X3 = Partisipasi
 ε = faktor lain yang diteliti
 β_1 = koefisien regresi variabel x1
 β_2 = koefisien regresi variabel x2
 β_3 = koefisien regresi variabel x3

koefisien korelasi berganda alat ini digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 6 Pedoman untuk interpretasi koefisien korelasi

Interval Nilai r	Interprestasi
0,001-0,200	Sangat Lemah
0,201-0,400	Lemah
0,401-0,600	Cukup Kuat
0,601-0,800	Kuat
0,801-1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, 2010

Uji Hipotesis

Uji Simultan (F-test)

Langkah-langkah pengujian menggunakan uji F yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$
 Perumusan hipotesis uji F adalah:
 $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$; Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi tidak terdapat pengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana pemerintah desa

- $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$; Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi terdapat

engaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana pemerintah desa
 b. Menghitung uji F (F-test)

$$F_{hitung} = \frac{R^2 - k - 1}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Keterangan:

R^2 : koefisien determinasi gabungan

k : jumlah variabel independen

n : jumlah sampel

c. kriteria pengambilan keputusan

- 1) jika ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dengan $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) jika ($F_{hitung} \leq F_{tabel}$) dengan $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Uji Parsial (T-test)

Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji t adalah sebagai berikut:

a. Menentukan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$

Perumusan hipotesis uji F adalah:

$H_0 : \beta_1 = 0$; Transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan dana pemerintah desa.

$H_a : \beta_1 \neq 0$; Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan dana pemerintah desa.

$H_0 : \beta_2 = 0$; Akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan dana pemerintah desa.

$H_a : \beta_2 \neq 0$; Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan dana pemerintah desa.

$H_0 : \beta_3 = 0$; Partisipasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan dana pemerintah desa.

$H_a : \beta_3 \neq 0$; Partisipasi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan dana pemerintah desa.

$$T_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan:

t : hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan t tabel

r : koefisien korelasi

n : jumlah sampel

c. kriteria pengambilan keputusan

1. Untuk transparansi jika ($t_{hitung} \leq t_{tabel}$) pada $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Begitu sebaliknya.
 2. Untuk akuntabilitas jika ($t_{hitung} \leq t_{tabel}$) pada $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Begitu sebaliknya
 3. Untuk partisipasi jika ($t_{hitung} \leq t_{tabel}$) pada $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Begitu sebaliknya
- Adapun bentuk pengujian hipotesis yang digunakan yaitu uji dua pihak (*Two Tail Test*) terlihat pada Gambar 1 berikut ini :



Sumber : Sugiyono (2013: 217)

Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan

b. Menghitung uji F (F-test)

variabel X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y (Sugiyono 2012;257). Rumus yang digunakan yaitu:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien korelasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Jumlah responden yang dijadikan sampel adalah 140 responden dari setiap kantor desa masing-masing terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang berada pada daerah Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Sukaraja & Kecamatan Ciawi. Kuesioner pada penelitian ini sebanyak 140 tetapi yang kembali hanya sebanyak 120 kuesioner. Untuk menggambarkan karakteristik responden maka dilakukan deskriptif penelitian berdasarkan atas pengelompokan menurut jenis kelamin, usia, masa kerja & pendidikan.

Rekapitulasi untuk karakteristik responden yang telah dikelompokkan disajikan pada tabel 7 berikut:

Tabel 7 Rekapitulasi Karakteristik Responden

No	Kriteria Responden	Karakteristik	Jumlah/orang
1	Jenis Klamim	Laki-laki	93 (77,5%)
2	Usia	31-40 Th	45 (37%)
3	Masa Kerja	> 4 Th	73(61%)
4	Tingkat Pendidikan	SMA	81(67,5%)

Sumber: Data diolah, 2017

Tanggapan Responden

Tabel 8 Rekapitulasi Tanggapan Responden

No	Variabel	Nilai Rata-rata	Keterangan Skor Tanggapan
1	Transparansi	4,45	Sangat Setuju
2	Akuntabilitas	4,41	Sangat Setuju
3	Partisipasi	4,47	Sangat Setuju
4	Pengelolaan Dana Pemerintah Desa	4,5	Setuju

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 8 tersebut, diambil kesimpulan bahwa jawaban responden untuk variabel transparansi yaitu memiliki nilai rata-rata skor tanggapan sebesar 4,45 dengan keterangan rata-rata sangat setuju dengan pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Jawaban untuk variabel akuntabilitas yaitu memiliki nilai rata-rata skor tanggapan sebesar 4,41 dengan keterangan rata-rata sangat setuju dengan pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Selanjutnya untuk variabel partisipasi memiliki jawaban rata-rata skor tanggapan sebesar 4,47

dengan keterangan rata-rata sangat setuju dengan pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Selanjutnya untuk variabel pengelolaan dana pemerintah desa jawaban responden memiliki rata-rata skor tanggapan sebesar 4,5 dengan keterangan rata-rata responden setuju dengan pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Sehingga dapat disimpulkan, rata-rata responden sangat setuju bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi akan mempengaruhi pengelolaan dana pemerintah desa pada kecamatan babakan madang, kecamatan sukaraja & kecamatan ciawi

Persamaan Regresi Linear Berganda adalah sebagai berikut:

Hasil persamaan regresi linear berganda

Tabel 9 Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.722	4.162		-8.94	.373
Transparansi	.394	.081	.442	4.861	.000
Akuntabilitas	.249	.090	.234	2.752	.007
Partisipasi	3.890	1.842	.160	2.112	.037

a. Dependent Variable: pengelolaan dana pemerintah desa

Sumber: Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2017

Berdasarkan tabel 9 tersebut diketahui bahwa nilai dari persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = -3.722 + 0,394X_1 + 0,249X_2 + 3.890X_3 + \varepsilon$$

Koefisien Korelasi Berganda

Analisis koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan hubungan antara

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi secara bersama-sama terhadap pengelolaan dana pemerintah desa. Adapun tabel koefisien korelasi sebagai berikut :

Tabel 10 Koefisien Korelasi Berganda
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.715 ^a	.511	.499	1.468

Sumber: Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2017

Berdasarkan tabel 10 tersebut, diperoleh nilai R sebesar 0,715. yang menunjukkan bahwa nilai R (0,715) tersebut berada pada interval nilai R (0,601 - 0,800) dengan derajat kekuatan hubungan yang kuat.

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	261.509	3	87.170	40.476	.000 ^b
Residual	249.816	116	2.154		
Total	511.325	119			

Pengujian Hipotesisi

1. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Secara Simultan Terhadap Pengelolaan Dana Pemerintah Desa.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan penerapan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan dana pemerintah desa.

Hasil uji F dapat diperoleh melalui tabel analisis varians (Anova) seperti yang terlihat pada tabel 11:

Tabel 11 Uji F ANOVA^a

Berdasarkan tabel 11 tersebut diketahui hasil pengujian menggunakan uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 40,476, sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 2,68. Maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($40,476 > 2,68$) dengan nilai signifikansi F sebesar $0,00 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

2. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Secara Parsial Terhadap Pengelolaan Dana Pemerintah Desa

Pengujian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan dana pemerintah desa.

Berikut ini adalah tabel uji t Hasil output SPSS :

Tabel 12 Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Error Std.	Beta		
1 (Constant)	-	4.162		-.894	.373
Transparansi	.394	.081	.442	4.861	.000
Akuntabilitas	.249	.090	.234	2.752	.007
Partisipasi	3.890	1.842	.160	2.112	.037

a. Dependent Variable: pengelolaan dana pemerintah desa
Sumber: Output pengolahan data, SPSS 22, 2017

Berdasarkan tabel t tersebut nilai t_{hitung} untuk transparansi sebesar 4,861.

nilai t_{hitung} untuk akuntabilitas sebesar 2,752, dan nilai t_{hitung} untuk partisipasi sebesar 2,112, Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilaksanakan untuk melihat besarnya kontribusi variabel penerapan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan dana pemerintah desa. Koefisien determinasi diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan, dan selanjutnya dikalikan 100% ($r^2 \times 100\%$) atau dengan langsung melihat nilai R Square (R^2). Untuk hasil analisis koefisien determinasi pada tabel 13 dibawah ini:

Tabel 13 Koefisien Determinasi R^2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.715 ^a	.511	.499	1.468

a. Predictors: (Constant), partisipasi, akuntabilitas, transparansi

b. Dependent Variable: pengelolaan dana pemerintah desa

Sumber: Output pengolahan data dengan SPSS 22, 2017

Berdasarkan tabel 13 diatas, diperoleh angka R^2 (*R square*) sebesar 0,511 atau (51,1%). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan dana pemerintah desa sebesar 51,1%, sedangkan sisanya 48,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

Standard Error of the Estimate merupakan suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi di dapat nilai 1,468 satuan, ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi pengelolaan dana pemerintah desa sebesar 1,468 satuan.

Pembahasan

Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada penelitian didominasi oleh laki-laki sebanyak 93 orang, dengan usia responden berkisar antara 31-40 tahun, dengan masa kerja > 40 tahun, dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 81 orang.

Uji F

Berdasarkan hasil uji F dapat diartikan bahwa pengelolaan dana desa pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja & Kecamatan Ciawi telah sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta dilaksanakan dengan tertib & disiplin anggaran. sehingga dengan menerapkan asas transparansi, akntabilitas dan partisipasi secara efektif dan bersamaan maka akan menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa serta dapat dikatakan bahwa tata kelola pemerintahannya sudah baik.

Uji t

Pengaruh Transparansi

Berdasarkan hasil uji parsial transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana pemerintah desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Riswanto (2016). Hal ini membuktikan bahwa transparansi yang diinformasikan kepada publik dan DPR dengan benar, sesuai dan seksama maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sehingga untuk meningkatkan kualitas penglolaan dana desa sesuai dengan yang diharapkan memerlukan penerapan peraturan yang telah ditetapkan.

Pengaruh Akuntabilitas

Berdasarkan hasil uji parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana pemerintah desa. Adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dikarenakan Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari proses perencanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sustrawati (2016).

Pengaruh Partisipasi

Adanya pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan dana pemerintah desa pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja & Ciawi di karena setiap tindakan dilakukan dengan melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi tersebut merupakan pedoman dan acuan wajib yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa Karakteristik responden yaitu didominasi oleh laki-laki sebanyak 93 orang, dengan usia responden berkisar antara 31-40 tahun, dengan masa kerja > 40 tahun, serta tingkat pendidikan SMA sebanyak 81 orang.

Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana pemerintah desa pada kec. Babakan Madang, Sukaraja dan Ciawi.

Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana pemerintah desa pada kec. Babakan Madang, Sukaraja dan Ciawi.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta beberapa kelemahan yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah desa perlu melakukan pengkajian ulang terkait pengelolaan dana desa dengan lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi secara optimal dan menyeluruh. Terutama tentang partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, karena partisipasi masyarakat masih belum nampak terlihat. Terkait dengan peningkatan transparansi pemerintah dapat meningkatkannya dengan cara menginformasikan jumlah dana yang didapat dan jumlah dana yang disalurkan kesetiap kegiatan/pembangunan dengan memasang spanduk sumber pendapatan desa dan mengeluarkan dana desa yang digunakan dalam satu periode.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melengkapi metode survei dengan wawancara guna meningkatkan kualitas jawaban serta keseriusan responden dalam menjawab pernyataan yang diajukan sehingga terhindar dari biasanya jawaban responden. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel-variabel lain yang dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap pengelolaan dana pemerintah desa seperti variabel tingkat pendidikan dan peran perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. **Akuntansi Sektor Publik**. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 17**, Cetakan Kelima, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. 2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi. Yogyakarta.
2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Andi, Yogyakarta
- Riswanto, Natak. 2016. **Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember**. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
- Republik Indonesia. 2014. UU No. 6 Tahun 2014 **Tentang Desa** . 2014. Permendagri No.113 Tahun 2014 **Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa**. Berita Negara Rerpblk Indonesia Nomor 2093. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. **Akuntansi Sektor Publik**; Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media.
2010. **akuntansi sektor publik: organisasi non laba**, edisi 2, mitra wacana media, jakarta.
- Saroso, Samiaji. 2012. **Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar**. Jakarta. Indeks
- Sutrawati STB Kadek. 2016. **Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo**. Jurusan Akuntansi Skripsi Fakultas Ekonomi

Dan Bisnis. Universitas Halu Oleo.
Kendari.

Sugiyono. 2010, **Statistika untuk Penelitian**. Alfabeta. Bandung.
2013, **Metode Penelitian Kombinasi**. Edisi Tiga. Alfabeta. Bandung.
2014. **Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi**. Alfabeta. Bandung.

Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2016.
Pasal 1 angka 2 **Tentang Dana Desa**